**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MENJALIN
SEBAGAI PENDIDIKAN DEMOKRASI YANG BERKARAKTER**

Lutfi Nur Aini

Institut Ilmu Kesehatan STRADA Indonesia

Lutfisatudua573@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendidikan kewarganegaraan, pendidikan demokrasi, bentuk-bentuk karakter kewarganegaraan dan bagaimana PKn sebagai pendidikan demokrasi yang berkarakter. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diajarkan untuk menciptakan warga negara yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara. Karakter yang dimiliki oleh warga Negara meliputi: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab. Untuk menciptakan karakter tersebut harus diintegrasikan dalam pendidikan demokrasi yang masuk kelompok studi sosial (Social Studies).

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Demokrasi dan Karakter Kewarganegaraan.

1. Latar Belakang

Demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Dalam demokrasi, setiap warga negara diperbolehkan untuk berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Setiap negara menganut sistem pemerintahan yang berbeda. Di beberapa negara, istilah demokrasi banyak digunakan sebuah negara untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang dianut. Indonesia menjadi satu di antara negara yang menganut sistem pemerintahan secara demokrasi. Negara yang menganut sistem demokrasi akan memberikan kebebasan warga negaranya untuk menyampaikan pendapat. Demokrasi juga memiliki ciri yaitu Keputusan Pemerintah untuk Seluruh Rakyat, Menjalankan Konstitusi, Adanya Perwakilan Rakyat, Adanya Sistem Kepartaian. Juga memiliki prinsip yaitu, Peradilan Tidak Memihak dan Bebas, Kebebasan Berpendapat dan Berserikat, Adanya Pergantian Pemerintahan, Kedudukan Rakyat Sama di Mata Hukum, Adanya Jaminan Hak Asasi Manusia, Adanya Kebebasan Pers. Dan memiliki

prinsip yaitu, . Demokrasi Berdasarkan Bentuknya dibagi menjadi dua yakni demokrasi prosedural dan demokrasi substansial. Demokrasi Berdasarkan Prosesnya dibagi menjadi dua yakni demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi Berdasarkan Ideologinya dibagi menjadi tiga yakni demokrasi liberal, demokrasi sosial, dan demokrasi pancasila.

Pendidikan demokrasi dapat saja merupakan pendidikan yang diintegrasikan ke dalam berbagai bidang studi, misal dalam mata pelajaran PPKn dan sejarah atau diintegrasikan kedalam kelompok ilmu sosial lainnya. Akan tepat bila pendidikan demokrasi masuk dalam kelompok studi sosial (social studies). Selain itu, pendidikan demokrasi dapat pula dijadikan subject matter tersendiri sehingga menjadi suatu bidang studi atau mata pelajaran.

Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik agar menjadi warga Negara yang punya komitmen yang kuat dan punya potensi untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945, dengan semangat kebangsaan dan berkehidupan kemasyarakatan, maka pemahaman tentang komitmen tersebut perlu ditingkatkan secara terus menerus kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai generasi penerus. Untuk membentuk warga negara yang berkomitmen dan berpotensi kuat, berkehidupan yang demokratis perlu dikenal, dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan dan organisasi-organisasi non-pemerintahan, agar mampu memahami dan melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara melalui jalur pendidikan. Dalam hal ini menjadi salah satu fokus mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk membelajarkannya kepada peserta didik.

2. Khusus / Masalah

Sebagai Pendidikan demokrasi yang berkarakter, dimana bangsa Indonesia menganut paham demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Demokrasi adalah salah satu muatan materi pelajaran yang tercantum dalam kurikulum PKn. Berbicara tentang

demokrasi bukanlah hal asing bagi kita. Banyak diantara kita yang telah paham tentang konsep maupun pengertian yang berkaitan dengan demokrasi. Namun apa dan bagaimana makna dan hakikat demokrasi belum sepenuhnya dimengerti dan dihayati. Perbincangan tentang demokrasi yang sering dibicarakan dimana-mana, belum begitu menyentuh makna yang sebenarnya, dan pelaksanaannya belum secara demokratis.

3. Tinjauan Pustaka

Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban suatu warga negara agar setiap hal yang di kerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang di harapkan. Karena di nilai penting, pendidikan ini sudah di terapkan sejak usia dini di setiap jejang pendidikan mulai dari yang paling dini hingga pada perguruan tinggi agar menghasikan penerus –penerus bangsa yang berompeten dan siap menjalankan hidup berbangsa dan bernegara.

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa,

wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang dan mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.

Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani.

Pendidikan demokrasi memberikan pelayanan pembelajaran yang optimal kepada para siswa. Pendidikan demokrasi harus mengimplementasikan kurikulum yang bersifat fleksibel dan terbuka, sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan siswa. Kebersamaan dan kerjasama merupakan salah satu ciri pendidikan demokrasi. Proses pembelajaran mengarahkan para siswa untuk bertanggung jawab sendiri atas apa yang dipelajari guna kepentingan mereka sendiri.

Pendidikan kewarganegaraan salah satu cerminan bahwa pendidikan di Indonesia menginginkan adanya pengembangan dari peserta didik itu sendiri bukan hanya intelektual melainkan juga sosial serta karakter dari peserta didik

guna untuk mempersiapkan diri menjadi warga masyarakat dan warga negara yang seutuhnya.

Karena untuk menjadi warga Negara yang baik harus memiliki karakter yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan mampu mengamalkan nilai-nilai moral yang terkandung didalamnya.

Oleh sebab itu menginternalisasikan serta mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sangat penting agar pada saat proses pembelajaran apa yang ingin diukur dari siswa tersebut benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan.

4. Pembahasan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia diartikan sebagai pendidikan politik yang fokus materinya adalah peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara.

Demokrasi, dari sudut bahasa

(etimologis), demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti atau rakyat dan cratos atau cratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi secara bahasa, demoscraitein atau demos-cratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat Sarbaini Saleh. Jadi kesimpulannya demokrasi adalah pemerintahan yang ada di tangan rakyat, rakyat yang memberikan ketentuan-ketentuan dalam masalah-masalah kehidupannya termasuk menilai kebijakan pemerintah negara karena hal tersebut menentukan kehidupan rakyat banyak. Dengan demikian negara yang menganut system demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kemauan dan kehendak rakyat. Saat ini, demokrasi merupakan komoditas rejim konseptual yang paling laku di dunia ini, serta menjadi keimanan sebagian besar umat manusia sebagai model ideal untuk mencapai tujuan perdamaian dan keadilan. Demokrasi tidak hanya berdiri kokoh di tempat kelahirannya saja, tetapi telah sedemikian jauh mengglobal dari Barat ke timur, mengalir dari utara ke selatan. Tentu saja proses perpindahan dan penyebaran demokrasi tidak seperti yang dibayangkan Tidak semudah yang diperkirakan dan tidak Semudah yang diharapkan. Karena demokrasi tidak hanya

terkait sistem yang kokrit, tetapi juga syarat akan muatan nilai, ide, konsepsi yang lebih abstrak sifatnya. Atau dengan kata lain demokrasi itu tidak hanya mempermasalahkan mekanisme perwujudan dan pembentukan sistem (prosedural) atau schumpeterian tetapi juga terkait dengan substansi (hakekat) yang sifatnya fundamental. Adapun 4 ciri-ciri Demokrasi Negara dengan sistem politik demokrasi.

Sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan, lebih mengutamakan musyawarah daripada paksaan dalam menyelesaikan perselisihan, sikap menerima legitimasi dari sistem pemerintahan.⁵ Selain ciri-ciri, Demokrasi juga memiliki dua prinsip utama, yaitu:

a). Kebebasan: dalam demokrasi, kebebasan merupakan dasar demokrasi. Demokrasi merupakan sistem politik yang melindungi kebebasan dan memberikan tugas pada pemerintah untuk menjamin kebebasan rakyat.

b). Kedaulatan rakyat: penyelesaian pertikaian secara damai dan sukarela, terjaminnya perubahan secara damai dalam masyarakat dinamis, pergantian kekuasaan secara teratur, penggunaan paksaan sesedikit

mungkin, pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman, penegakan keadilan, kemajuan ilmu pengetahuan, pengakuan dan penghormatan atas kebebasan.

Ada tujuh faktor-faktor yang mendorong apakah suatu negara akan memakai demokrasi yang terdesentralisasi atau nasionalisme yang kokoh tersentralistik sebagai berikut:

1) Faktor sifat dan bentuk Negara

2) Faktor rezim

Sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

a) Adanya partisipasi masyarakat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

b) Adanya pengakuan akan supremasi hukum (daulat hukum)

c) Adanya kebebasan, diantaranya: kebebasan berekspresi dan berbicara atau berpendapat, kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk menggugat pemerintah, kebebasan untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, dan kebebasan untuk mengurus nasib sendiri, dan

d) Adanya pengakuan supremasi sipil atas militer.

Demokrasi pascareformasi merupakan salah satu reaksi terhadap pemerintah Orde Baru yang dianggap telah menyimpang dari tujuan dan cita-cita demokrasi pancasila. Era reformasi berlangsung dari 1998 sampai dengan saat ini atau sering disebut orde transisi demokrasi Pancasila. Era reformasi dimulai setelah Presiden Suharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden Prof. Dr. B.J. Habibie. Di masa reformasi, kebebasan masyarakat dalam menggunakan haknya menjadi lebih terbuka dan meluas. Masyarakat semakin melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Masyarakat lebih kritis dan terbuka. Demokrasi tidak hanya menjadi identitas, tetapi diupayakan untuk diaplikasikan secara total oleh pemerintah. Bangsa Indonesia telah sepakat untuk membangun sistem demokrasi yang sehat atas dasar evaluasi dan inspeksi terhadap berbagai sistem demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia yang ternyata dinilai gagal, yaitu demokrasi liberal pada awal kemerdekaan yang tidak menjamin stabilitas pemerintahan, demokrasi dipimpin pada era Orde Lama

dan demokrasi Pancasila di era Orde Baru yang menghasilkan pemerintahan yang otoriter.

Budaya demokratis haruslah menjadi langgam/ gaya hidup bagi setiap warganegara baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Budaya demokrasi haruslah menjadi jalan hidup bangsa Indonesia; sebab, hanya dengan cara itulah demokrasi berdasarkan Pancasila dalam bidang politik, ekonomi ataupun sosial benar-benar dapat kita jalankan. Perilaku demokratis tidak hanya berlaku dalam kehidupan bernegara, melainkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Sebab aspek kehidupan itu tidak dapat dipisah-pisahkan walau dapat dibeda-bedakan. Kehidupan politik tidak terpisah dari kehidupan sosial, ekonomi dan sebagainya. Karena itu, kita tidak dapat berperilaku demokratis dalam kegiatan politik sementara dalam kegiatan hidup sehari-hari tidak. Demokrasi harus menjadi jalan hidup, atau prinsip yang menjiwai tindakan kita dalam segala bidang.

Sikap dan perilaku demokratis dapat dipelajari dan dibiasakan. Karena itu, kita perlu belajar bersungguh-sungguh dan berupaya keras membiasakan diri agar selalu bersikap dan berperilaku demokratis. Hal itu

bisa kita mulai dari lingkungan yang paling kecil, keluarga kita. Dalam pergaulan dan kegiatan di sekolah atau di masyarakat sekitar, sikap dan perilaku demokratis perlu kita kembangkan. Kehidupan demokrasi itu sangat nyata diterapkan ketika ada suatu masalah di kampung, demokrasi tidak berjalan apabila pihak yang memecahkan masalah itu hanya ketua adat saja. Sebaliknya, demokrasi berjalan apabila semua warga kampung dilibatkan untuk memecahkan masalah tersebut. Masing-masing warga tertentu memiliki pandangan tertentu terhadap masalah dan pemecahannya.

Jadi salah satu pentingnya kehidupan demokrasi dalam masyarakat, yakni keefektifan dan kecepatan dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam lingkungan masyarakat. Pentingnya kehidupan demokrasi dalam masyarakat dapat pula menumbuhkan semangat kerukunan antara anggota masyarakat. Bahkan demokrasi dapat menjadi wahana silaturahmi bagi warga masyarakat. Dengan demikian, kekeluargaan, kebersamaan, kebebasan mengemukakan pendapat, dan sebagainya akan tumbuh dengan sendirinya.

Karakter berasal dari bahasa

Yunani yang berarti "to mark" atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia. Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Dekdiknas adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, dll. Sedangkan berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, dan berwatak.

Individu yang berkarakter baik dan unggul adalah seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan negara serta dunia internasional pada umumnya dengan mengoptimalkan potensi (pengetahuan) dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi dan motivasinya (perasaannya). Dalam mata pelajaran PPKn, karakter warga negara sering dikenal dengan istilah civic disposition, yaitu sifat-sifat yang harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi politik, berfungsinya sistem politik yang sehat, berkembangnya martabat,

harga diri dan kepentingan umum. Seorang warga negara dituntut untuk memiliki karakter dan menerapkannya sesuai dengan peranannya. Karakter tersebut adalah:

a) Karakter individual, yaitu nilai-nilai unik dan baik yang terpatери dalam diri dan mendarah daging dalam perilaku seseorang. Misalnya: jujur dan kerja keras.

b) Karakter privat, seperti tanggung jawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat martabat manusia dari setiap individu.

c) Karakter publik, seperti: kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main, berpikir kritis, kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi .

PKN Sebagai Pendidikan Demokrasi yang Berkarakter

Pendidikan demokrasi dapat saja merupakan pendidikan yang diintegrasikan ke dalam berbagai bidang studi, misal dalam mata pelajaran PPKn dan sejarah atau diintegrasikan kedalam kelompok ilmu sosial lainnya. Akan tepat bila pendidikan demokrasi masuk dalam kelompok studi sosial (social studies). Selain itu, pendidikan demokrasi dapat pula dijadikan subject matter tersendiri sehingga menjadi suatu

bidang studi atau mata pelajaran. Misalnya, dimunculkan di mata pelajaran civics yang masa lalu pernah menjadi mata pelajaran sekolah. Namun, civics yang sekarang hendaknya dipertegas dan dibatasi sebagai pendidikan demokrasi di Indonesia. Dapat pula pendidikan demokrasi dikemas dalam wujud Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan demokrasi dalam arti luas dapat dilakukan baik secara informal, formal, dan non formal. Secara informal, pendidikan demokrasi bisa dilakukan di lingkungan keluarga yang menumbuhkembangkan nilai-nilai demokrasi. Secara formal, pendidikan demokrasi dilakukan di sekolah, baik dalam bentuk intra atau ekstrakurikuler. Sedang secara nonformal pendidikan demokrasi berlangsung pada kelompok masyarakat, lembaga swadaya, partai politik, pers, dan lain-lain.

Hal yang sangat penting dalam pendidikan di sekolah adalah mengenai kurikulum pendidikan demokrasi yang menyangkut dua hal, yaitu penataan dan isi materi. Penataan menyangkut pemuatan pendidikan demokrasi dalam suatu kegiatan kurikuler, apakah secara eksplisit dimuat dalam suatu mata pelajaran atau mata kuliah, ataukah disisipkan ke dalam mata pelajaran umum.

Merujuk pada prinsip-prinsip pemerintah yang demokratis di bawah Rule of Law, maka pendidikan kewarganegaraan memegang posisi penting guna membangun kultur warga negara yang demokratis.

Selain masalah penataan, yang lebih penting lagi adalah masalah isi materi dari pendidikan demokrasi. Agar benar-benar berfungsi sebagai pendidikan demokrasi maka materinya perlu ditekankan pada empat hal, yaitu asal-usul sejarah demokrasi dan perkembangan demokrasi; sejarah demokrasi di Indonesia; jiwa demokrasi Indonesia berdasar Pancasila dan Uud 1945; dan masa depan demokrasi. Asal-usul demokrasi akan membelajarkan anak mengenai perkembangan konsep demokrasi dari mulai konsep awal hingga menjadi konsep global saat ini. Materi tentang demokrasi Indonesia membelajarkan anak akan kelebihan, kekurangan, serta bentuk-bentuk ideal demokrasi yang tepat untuk Indonesia. Materi masa depan demokrasi akan membangkitkan kesadaran anak mengenai pentingnya demokrasi serta memahami tantangan demokrasi yang akan muncul di masa depan. Untuk menghindari terjadinya indoktrinasi, materi-materi yang berisi doktrin-doktrin negara

sedapat mungkin diminimalkan dan diganti dengan pendekatan historis dan ilmiah, serta dikenalkan dengan fakta-fakta yang relevan.

Demokrasi memang tidak diwarisi, tetapi ditangkap dan dicerna melalui proses belajar oleh karena itu untuk memahaminya diperlukan suatu proses pendidikan demokrasi. Demokrasi memerlukan usaha nyata setiap warganegara dan perangkat pendukungnya yaitu budaya yang kondusif sebagai manifestasi dari suatu mind set (kerangka berfikir) dan setting social (rancangan masyarakat) dengan menjadikan demokrasi sebagai pandangan hidup bernegara baik oleh rakyat maupun oleh pemerintah.

Sekarang PKn sebagai mata pelajaran mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, yang mengembang sebagai pendidikan demokrasi. PKn adalah salah satu ciri pemerintah demokrasi yang isi materi pendidikan demokrasi di sekolah mendapat porsi yang lebih dalam waktu membelajarkannya. Namun dalam pelaksanaan di lapangan PKn hanya mendapat porsi yang sedikit dan cara membelajarkannya seakan hanya sebatas memperkenalkannya saja. Winarno mengatakan, agar PKn benar-benar berfungsi

sebagai pendidikan demokrasi maka materinya perlu ditekankan pada empat hal, yaitu asal usul sejarah demokrasi dan perkembangan demokrasi; sejarah demokrasi di Indonesia; jiwa demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan masa depan demokrasi.

PKn memiliki dan sejalan dengan tiga fungsi pokok pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan warganegara yang demokratis, yakni mengembangkan kecerdasan warganegara (civic intelligence), membina tanggung jawab warganegara (civic responsibility), dan mendorong partisipasi warganegara (civic participation) Winataputra. tiga kompetensi warganegara ini sejalan pula dengan tiga komponen pendidikan kewarganegaraan yang baik, yaitu pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), keterampilan kewarganegaraan (civic skills), dan karakter warganegara (civic dispositions). Warganegara yang memiliki pengetahuan kewarganegaraan akan menjadi warganegara yang cerdas, warganegara yang partisipatif, sedangkan warganegara yang memiliki karakter kewarganegaraan akan menjadi warganegara yang bertanggung jawab.

Pendidikan kewarganegaraan mengemban tugas menyiapkan peserta didik menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggung jawab untuk mendukung tegaknya negara demokrasi. Pendidikan sekolah memiliki misi sebagai pendidikan politik demokrasi di Indonesia. Jadi PKn mempunyai tugas membelajarkan demokrasi secara demokratis kepada peserta didik. Dengan pendidikan kewarganegaraan, akan ada sosialisasi, dan penyebaran nilai-nilai demokrasi pada masyarakat. Untuk membelajarkan demokrasi

kepada peserta didik ada berbagai cara yang dapat dilakukan. James McGregor dalam Winataputra menyatakan bahwa pembelajaran demokrasi mempunyai banyak cara yang dapat ditempuh dengan mengaitkan lingkungan di luar kelas. Sedangkan Couto dalam Winataputra memberi gambaran bahwa pembelajaran demokrasi memerlukan sejumlah proses yang secara implisit terjadi dalam peran guru maupun siswa selama proses pembelajaran di kelas yang demokratis dengan mengaitkan persoalan-persoalan dari lingkungan sekitar.

5. Kesimpulan

Demokrasi adalah pemerintahan yang ada di tangan rakyat, rakyat yang memberikan ketentuan-ketentuan dalam masalah-masalah kehidupannya termasuk menilai kebijakan pemerintah negara karena hal tersebut menentukan kehidupan rakyat banyak. Secara informal, pendidikan demokrasi bisa dilakukan di lingkungan keluarga yang menumbuhkembangkan nilai-nilai demokrasi. Secara formal, pendidikan demokrasi dilakukan di sekolah, baik dalam bentuk intra atau

ekstrakurikuler. Pendidikan kewarganegaraan mengemban tugas menyiapkan peserta didik menjadi warganegara yang demokratis, bertanggung jawab dan memiliki karakter yang baik untuk mendukung tegaknya negara demokrasi.

6. Daftar Pustaka

- Alfitri, Rogaiyah. 2009. Jurnal PPKn & Hukum: Demokrasi Indonesia. Vol 4.
- Al Hakim, Suparlan Dkk. Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia. Jakarta. Bumi Aksara.
- Budiyanto. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI. Jakarta. Erlangga.
- Bambang TriP. Dan Sunardi H.S. 2012. Membangun Wawasan Kewarganegaraan SMA/Ma Kelas XI. Jakarta. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Guru, Tim Abdi Dkk. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas VIII. Jakarta. Erlangga.
- Sodik, M. A., & Nzilibili, S. M. M. (2017). The Role Of Health Promotion And Family Support With Attitude Of Couples Childbearing Age In Following Family Planning Program In Health. *Journal of Global Research in Public Health*, 2(2), 82-89.
- Sodik, Muhammad Ali, and Simon Martin Manyanza Nzilibili. "The Role Of Health Promotion And Family Support With Attitude Of Couples Childbearing Age In Following Family Planning Program In Health." *Journal of Global Research in Public Health* 2.2 (2017): 82-89.
- Aini, L. N. (2021). Pendidikan Mempunyai Peran Geografi Untuk Menjalin Persatuan Dan Kesatuan.
- Aini, L. N. (2021). Hak Asasi Manusia Terhadap Warga Negara Jaminan Kesehatan.
- Lubis, M. A. (2018). PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PENDIDIKAN DEMOKRASI YANG BERKARAKTER.